

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIRAN

A. Studi kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini untuk dapat mengetahui adanya Pelaksanaan Tugas Camat dalam membina Perangkat Desa di Kecamatan Tasik Putri puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Terlebih dahulu penulis akan memaparkan teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli khususnya teori tentang pemerintahan, peranan, pembinaan dan desa.

1. Konsep Pemerintahan

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah kemudian mendapat awalan pe-menjadi kata pemerintahan, seperti yang dijelaskan Syafiie dkk (2002:3) berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus negara, serta mendapatkan akhir-an menjadi kata pemerintahan, berarti perihal, cara, pembuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memilih legitimasi.

Menurut Ndraha (2011:3) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002:14) antara lain adalah:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa memelatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu negara (dalam negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan).

Menurut Iver (dalam Syafiie, 2011:4) pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta sebagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

2. Manajemen Pemerintahan.

Menurut Handoko (2003:8) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yg telah ditetapkan.

Sihotang (2006:6) menyatakan bahwa Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pendayagunaan sumber daya non manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut yang sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hasibuan (2006:2) mengatakan bahwa Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Ndara (2001:161:162) fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pemerintahan.
2. Pengorganisasian sumber-sumber Pemerintahan.
3. Penggunaan sumber-sumber Pemerintahan.
4. Kontrol pemerintahan.

Perencanaan dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan organisasi. *Controlling* pemerintahan dilakukan semenjak *Actuating* dijalankan meliputi sub fungsi komunikasi pemerintahan, koordinasi pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan. Dengan demikian organisasi pemerintahan maupun swasta memerlukan publik manajemen

agar roda pemerintahan yang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Manajemen merupakan elemen yang diperlukan didalam kehidupan manusia, tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dilaksanakan secara individual (Winardi 2007:1).

Dalam bukunya yang berjudul teori organisasi dan pengorganisasian Winardi (2007:15) mendefinisikan organisai yaitu sebuah sistem yang terbuat dari aneka macam elemen dan subsistem manusia mungkin merupakan subsistem terpenting dan dimana terlihat masing-masing subsistem saling berintegrasi dalam upaya sarana-sarana atau tujuan organisasi yang bersangkutan.

Hasibuan (2001:2) juga memberikan pengertian tentang manajemen dimana menurutnya manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis,2005:133).

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan kumpulan usaha-usaha kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, manajemen sangat penting dalam pemerintahan dimana masing-masing subsistem saling berintegrasi dalam upaya sasaran-sasaran atau tujuan pemerintahan, bekerjasama dengan swasta dan masyarakat umum untuk tercapainya *Good Governance*.

3. Pengertian Tugas dan Fungsi

Menurut Winardi (2007:26) Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Masih Winardi (2007:24) tugas pokokkesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan Thoha (1998:76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seseorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

4. Pembinaan

Pembinaan Menurut Santoso (2005:57) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain :

- a. Penyuluhan.
- b. Pengarahan.
- c. Bimbingan.

Pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang dibina dan dari pada itu pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang membina dan apa yang dibina.

Selanjutnya Thoha (2008:7) pembinaan sebagai suatu tindakan, proses hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan dan peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan sesuatu. Menurutnya ada dua unsur dalam pengertian yang dikemukakan Thoha, yaitu : pembinaan itu sendiri bisa berupa tindakan dan proses dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu menunjukkan kepada perbaikan terhadap sesuatu.

Menurut Wijaksono (2006:223) menyatakan pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagai mana mestinya.

Sementara itu Ndraha (1991:166) mengatakan istilah pembinaan menunjukkan pengarahan, pengaturan dan pengisian. Untuk melaksanakan pembinaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu :

1. Pendidikan.
2. Latihan.
3. Loka karya (workshop).
4. Bimbingan lapangan (penyuluhan).
5. Penerangan dan diskusi.
6. Media cetak dan elektronik.
7. Instruksi-instruksi.
8. Teladan.

Berdasarkan teori diatas mengenai pembinaan disini penulis menggunakan teori Santoso (1995:52) mengemukakan bahwa pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu penyuluhan, pengarahan dan bimbingan.

5. Konsep Camat.

Menurut PP No.19 tahun 2008 tentang kecamatan, camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 pasal 14 menyebutkan :

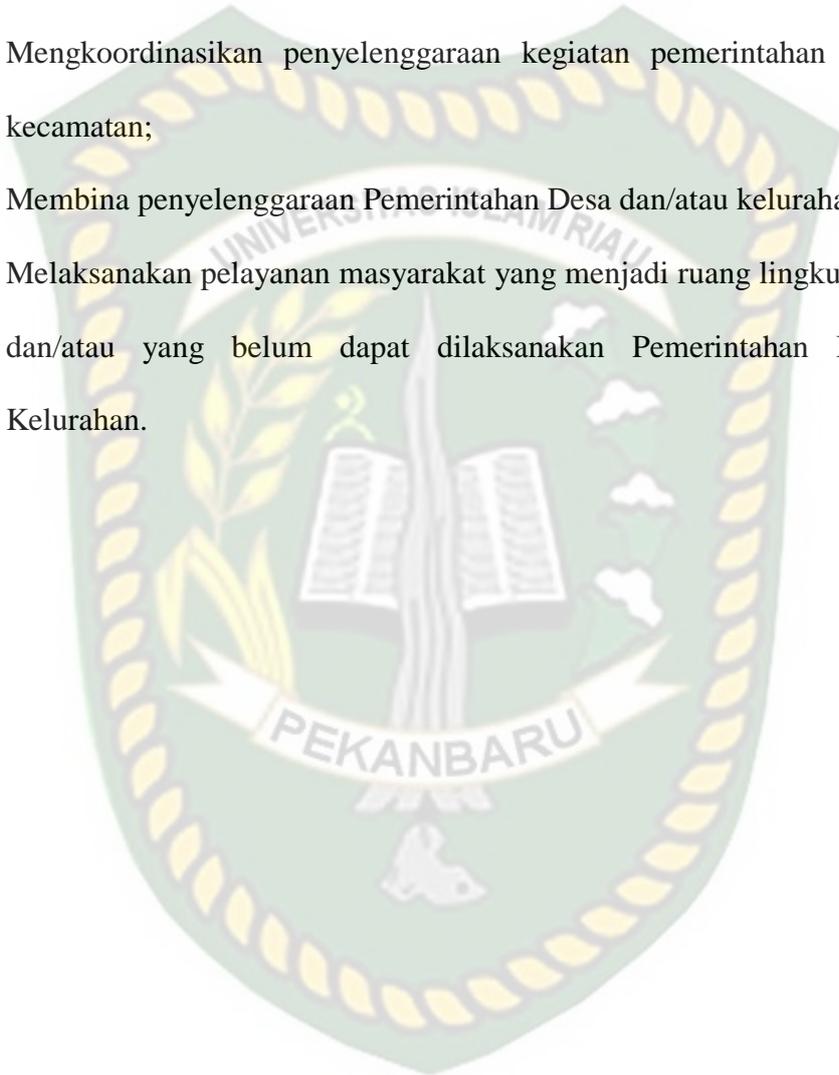
1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
2. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Pemerintah kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten/kota yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan organisasi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah kecamatan selain mempunyai tugas-tugas pemerintahan dan menyelenggarakan pelayanan masyarakat diwilayah kerjanya, pemerintah kecamatan juga berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan yang berada dibawahnya yaitu pemerintahan desa sebagai mana diamanatkan dalam perundang-undangan.

6. Tugas dan Fungsi camat

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilempahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
2. Camat sebagaimana disebutkan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.



B. Penelitian terdahulu

Tabell.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian sebelum-sebelumnya.

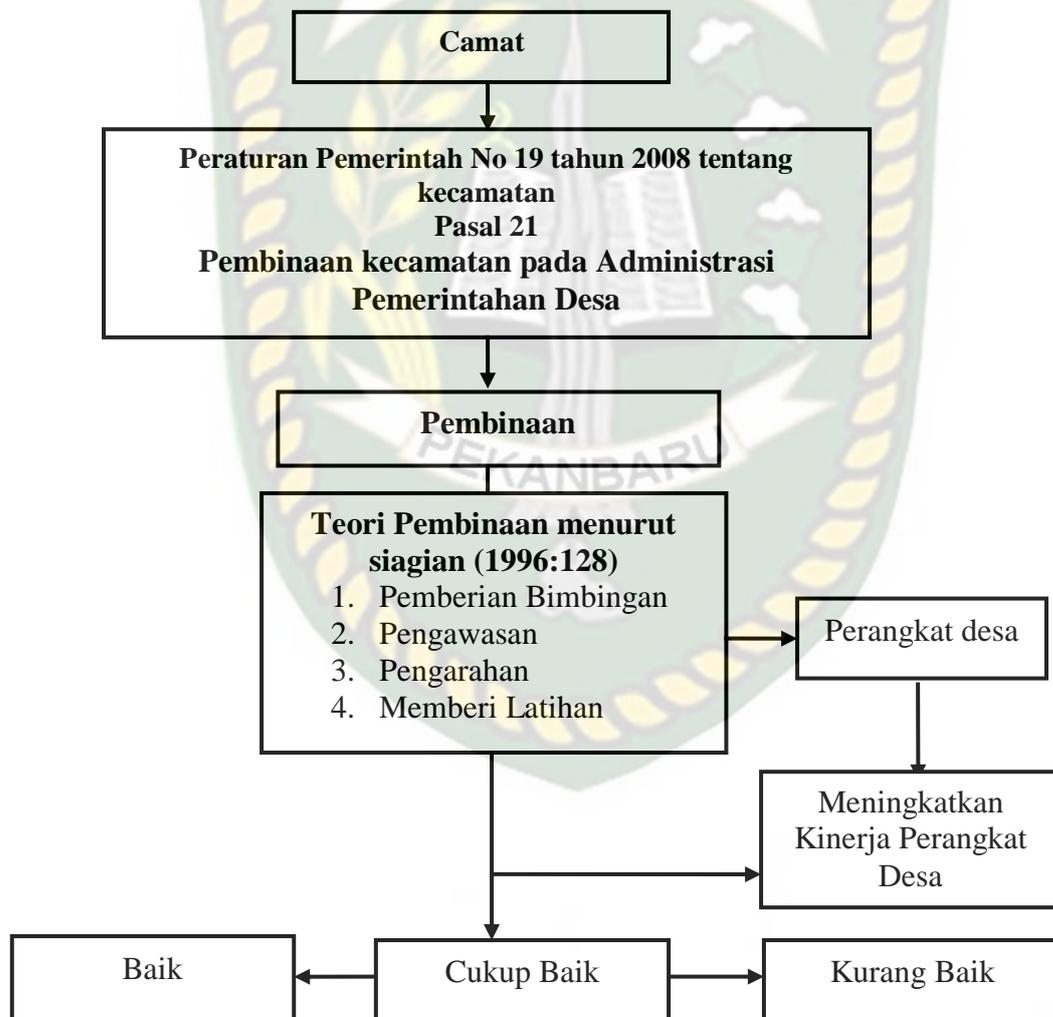
No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Pelaksanaan Tugas Camat dalam membina pemerintah Desa diKecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragili Hilir.	Persamaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya ini yaiyu sama-sama meneliti tentang peranan Camat dalam melakukan pembinaan	Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya ini yaitu dia menggunakan Teori Efendy sedangkan saya Teori Santoso Sastroputro.
2	Peranan Camat dalam membina Penyelenggaraan Perangkat Desa diKecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	Persaman penelitian saya dengan penelitian sebelumnya ini yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif.	Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya ini dia menggunakan Teori Ndara sedangkan saya menggunakan Teori Santoso Sastroputro.
3	Peranan Camat dalam melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa diKecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.	Persamaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya ini sama-sama menggunakan Teori Santoso Sastroputro.	Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya ini dia menggunakan Metode kualitatif sedangkan saya metode Kuantitatif.

Sumber : Skripsi Terdahulu

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan pada tinjauan pustaka dan sebelumnya, selanjutnya penulis menjabarkan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut

Gambar II.2: Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Perangkat Desa Di Kecamatan Tasik PutriPuyu Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber : Data Olahan Penelitian 2018

D. Hipotesis

Adapun hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah “Jika Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Perangkat Desa Di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti baik, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat”.

E. Konsep Operasional

Untuk memperjelas konsep teoritis yang telah dicantumkan dan memperjelas pengertian, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini:

1. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah.
2. Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.
3. Organisasi pemerintahan adalah organisasi yang dalam pengelolaannya sering mendapat campur tangan dari pemerintah (bias langsung dari Pemerintah Pusat, maupun dari Pemerintah Daerah/kota).
4. Peranan adalah suatu upaya atau kemampuan maupun perilaku dari pemerintah yang menduduki jabatan pemerintahan Kecamatan agar dapat menggerakkan,

membimbing, dan membina serta menumbuhkan rasa kesadaran dan partisipasi masyarakat Kecamatan untuk mencapai tujuan yakni tumbuh dan kembang mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

5. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kecamatan, berada dibawah, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.
8. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seseorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan kelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.
9. Pembinaan adalah kekuatan memimpin, membimbing dan mengarahkan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekerja atau

penerima karir, dan tujuan pembinaan adalah agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik, sejahtera dan sempurna.

- a. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada suatu individu melalui pendidikan dan petunjuk, agar yang diberikan bimbingan dapat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan persoalan-persoalan sehingga dapat mencapai tujuan tertentu.
- b. Pengawasan yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- c. Pengarahan adalah kegiatan untuk menggerakkan orang lain supaya bisa dan dapat bekerja dengan baik dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan, memberikan masukan pada anggotanya sehingga dapat menunjang tingkat pengetahuannya.
- d. Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau yang ada kegiatan dengan pekerjaannya.

F. Operasional Variabel

Adapun operasional variable mengenai Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Perangkat Desa diKecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti adalah :

Tabel II.3 : Konsep Operasional Variable Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Perangkat Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Pembinaan adalah: pemberian pedoman atau arahan dari atasan kepada bawahan, untuk menciptakan hasil kerja yang baik. Santoso Sasroputro (1988-291)	Pembinaan Camat terhadap Perangkat Desa	Pemberian bimbingan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberi petunjuk terhadap perangkat desa. b. Pemerintah desa dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan. c. Adanya diskusi 	Nominal
		Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Camat melakukan kunjungan langsung ke Desa. b. Melakukan koreksi dan perbaikan kerja. c. Melakukan penilaian terhadap pekerjaan perangkat desa. 	Nominal

1	2	3	4	5
		Pengarahan	a. Memberikan pengarahan kepada perangkat desa. b. Mengadakan pertemuan khusus	Nominal
		Memberi Latihan	a. Adanya pelatihan yang diberikan camat terhadap perangkat desa. b. Membuat sebuah program pelatihan c. Evakuasi	Nominal

Sumber : Data Olahan 2018.

G. Teknik pengukuran

Setelah dikemukakan konsep-konsep yang bersangkutan dengan penelitian ini, maka penulis menetapkan teknik pengukuran atas variabel dan indikator pembinaan. Pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini dalam (3) kategori, yaitu :

Baik : Apabila tanggapan responden terhadap pelaksanaantugas camat dalam membina perangkat desa mengkirau rata-rata berada pada skala 67-1000%.

Cukup Baik : Apabila tanggapan responden terhadap pelaksanaan tugas dalam membina pemerintah desa mengkirau rata-rata beradapada skala 34-66%.

Kurang Baik : Apabila tanggapan responden terhadap pelaksanaan tugas camat dalam membina pemerintahan desa mengkirau rata-rata berada pada skala <34%.

Adapun untuk indikator pembinaan, teknik pengukurannya sebagai berikut:

1. Pemberi Bimbingan

Baik : Apabila tanggapan responden terhadap pelaksanaantugas camat dalam membina perangkat desa mengkirau dalam memberi bimbingan rata-rata berada pada skala 67-1000%.

Cukup Baik : Apabila tanggapan responden terhadap pelaksanaan tugas dalam membina pemerintah desa mengkirau dalam memberi bimbingan rata-rata beradapada skala 34-66%.

Kurang Baik : Apabila tanggapan responden terhadap pelaksanaan tugas camat dalam membina pemerintahan desa mengkirau dalam memeberi bimbingan rata-rata berada pada skala <34%.

2. Pengawasan

Baik : Apabila tanggapan responden terhadap pelaksanaantugas camat dalam membina perangkat desa mengkirau dalam pengawasan rata-rata berada pada skala 67-1000%.

Cukup Baik : Apabila tanggapan responden terhadap pelaksanaan tugas dalam membina pemerintah desa mengkirau dalam pengawasan rata-rata beradapada skala 34-66%.

Kurang Baik : Apabila tanggapan responden terhadap pelaksanaan tugas camat dalam membina pemerintahan desa mengkirau dalam pengawasan rata-rata berada pada skala <34%.

3. Pengarahan

Baik : Apabila tanggapan responden terhadap pelaksanaantugas camat dalam membina perangkat desa mengkirau dalam pengarahan rata-rata berada pada skala 67-1000%.

Cukup Baik : Apabila tanggapan responden terhadap pelaksanaan tugas dalam membina pemerintah desa mengkirau dalam pengarahan rata-rata beradapada skala 34-66%.

Kurang Baik : Apabila tanggapan responden terhadap pelaksanaan tugas camat dalam membina pemerintahan desa mengkirau dalam pengarahan rata-rata berada pada skala <34%.

4. Memberi Pelatihan

Baik : Apabila tanggapan responden terhadap pelaksanaantugas camat dalam membina perangkat desa mengkirau dalam pemberian pelatihan rata-rata berada pada skala 67-1000%.

Cukup Baik : Apabila tanggapan responden terhadap pelaksanaan tugas dalam membina pemerintah desa mengkirau dalam pemberian pelatihan rata-rata beradapada skala 34-66%.

Kurang Baik : Apabila tanggapan responden terhadap pelaksanaan tugas camat dalam membina pemerintahan desa mengkirau dalam pemberian pelatihan rata-rata berada pada skala <34%.

